

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Koperasi**

Sejarah koperasi lahir pada pemula abad ke – 19 sebagai suatu reaksi terhadap sistem perekonomian kapitalisme di Negara – negara Eropa. Sistem ekonomi ini bersendi pada kebebasan individu untuk mencari keuntungan sebanyak mungkin. Akibatnya kelompok – kelompok tertentu yaitu kaum kapitalis menguasai kehidupan masyarakat luas. Mereka hidup berlebihan, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki modal makin tertindas. Pada saat itulah tumbuh aliran kebersamaan yang menentang aliran individualisme ini dengan asas kebersamaan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Bentuk kerja sama ini melahirkan suatu perkumpulan yang dinamakan koperasi.

Banyak definisi tentang koperasi, diantaranya :

Dalam peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 sesuai dengan Stadar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (2012:09) mendefinisikan koperasi sebagai berikut :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip – prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Berdasarkan UU No 17 tahun 2012 koperasi adalah :

Badan hukum yang didirikan oleh orang atau perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Prof. Dr. Tiktik Sartika partomo, M.S. (2009:20) definisi koperasi sebagai berikut :

Koperasi adalah perkumpulan orang – orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersamaan diusahakan pemenuhannya mealui usaha yang dilaksanakan untuk koperasi. Jadi, orang – orang tersebut bergabung dengan sukarela atas kesadaran adanya kebutuhan bersama, tanpa paksaan dan ancaman dari pihak lain.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri – ciri yang melekat pada pengertian koperasi adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kelompok orang yang mempunyai kepentingan ekonomis yang sama.
- 2) Memiliki dan membangun satu usaha bersama.
- 3) Memiliki motivasi kuat untuk dapat berdikari sebagai kegiatan utama dan pada kelompok.

Kepentingan bersama yang merupakan cermin dari kepentingan individu/anggota adalah tujuan utama bersama mereka.

### **2.1.2. Karakteristik Koperasi**

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 sesuai

dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (2012:09) koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai – nilai : kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, sosial dan peduli terhadap orang lain.

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya. Karakteristik koperasi yaitu :

- a. Koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai – nilai kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, kebersamaan dan demokrasi, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain.
- c. Koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi serta dimanfaatkan oleh anggotanya.
- d. Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggotanya.

### **2.1.3. Prinsip Koperasi**

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan sebagai landasan kehidupan koperasi, yang terdiri dari :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing – masing anggota.
- d. Kemandirian.
- e. Pendidikan perkoperasian.
- f. Kerjasama antar koperasi.

#### **2.1.4. Perbedaan Koperasi dan Non Koperasi**

Menurut Rudianto (2010:43), ditinjau dari proses kegiatan dalam usaha mencapai cita – citanya sebagai badan usaha, dapat dengan jelas terlihat perbedaan antara koperasi dan non koperasi tersebut. Dalam hubungan ini beberapa dimensi dapat digunakan sebagai variabel menjelaskan perbedaan yang dimaksud, yaitu antara lain :

- 1) Dimensi Kekuasaan Tertinggi Dalam Menentukan Kebijakan Usaha.

Perbedaannya dalam koperasi kebijakan ada ditangan para anggota melalui kelengkapan koperasi yang disebut “ Rapat Anggota Tahunan“. Sedangkan dalam badan usaha non koperasi kekuasaan terdapat pada para pemegang saham.

- 2) Dimensi Ketatalaksanaan Usaha.

Koperasi pada prinsipnya adalah *Open Management* (keterbukaan manajemen). Sedangkan pada non koperasi dimensi ketatalaksanaan usaha ini adalah bersifat tertutup. Perbedaannya yaitu bila koperasi usahannya ditujukan kepada dua sektor yaitu sektor intern (anggota)

dan sektor ekstern (bukan anggota/umum). Sedangkan bagi non koperasi aspek tersebut Cuma ditujukan untuk umum dan masyarakat disekitar yang ingingin menggunakan jasa usaha tersebut.

3) Dimensi Dasar Keyakinan Usaha.

Pada badan usaha koperasi lebih mengutamakan pada kekuatan sendiri. Sedangkan pada badan usaha non koperasi berdasarkan keyakinan usahanya pada kekuatan modal dan pasar.

4) Dimensi Kemanfaatan Usaha, Dimensi Modal Kerja, Dimensi Pembagian Sisa Hasil Usaha.

Bagi badan usaha koperasi usahanya bermanfaat bagi anggotanya dan juga masyarakat. Sedangkan pada badan non koperasi kemanfaatan usaha tersebut tertuju kepada pemilik – pemilik modal dan masyarakat. Bila didasarkan pada modal usahanya dari masyarakat yang melebihi saham – sahamnya.

5) Dimensi Sikap Terhadap Pasar.

Dalam pembagian sisa hasil usaha (SHU) atau surplus atau keuntungan maka dalam koperasi didasarkan pada banyaknya jasa anggota sedangkan pada usaha non koperasi maka pembagian sisa hasil usaha (SHU) atau surplus atau keuntungan maka berdasarkan pada modal yang disetorkan. Demikian pula bila ditinjau dari dimensi sikap keduanya terhadap pasar, pada koperasi dijalin koordinasi antara koperasi sedangkan pada usaha non koperasi sikapnya terhadap pasar adalah persaingan murni.

6) Dimensi Tujuan Usaha.

Ditinjau dari dimensi tujuan usaha yaitu tujuan didirikannya koperasi adalah untuk memberikan pelayanan sedangkan pada non koperasi tujuan usahanya adalah mencari keuntungan sebesar – besarnya.

**2.1.5. Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK - ETAP)**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 19 Mei 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terdiri dari 30 BAB, yang mana pada tiap – tiap bab membahas standar akuntansi (ketentuan) yang berbeda – beda.

Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) suatu peraturan yang di buat oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang tidak semua perusahaan mentaatinya, Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksud untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang memiliki dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong dari entitas tanpa akuntabilitas publik.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) akan dinyatakan efektif berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas yang memiliki 2 kriteria, yaitu : tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan tidak

menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Kriteria Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) tersebut, bisa dibedakan dengan entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu jika :

1. Entitas telah mengajukan pertanyaan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pedagang efek, dana pensiun dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berwenang membuat regulasi yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) oleh Dirjen Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ini adalah sebagai alternatif Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang boleh diterapkan oleh entitas di Indonesia, sebagai bentuk Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang lebih sederhana dibandingkan dengan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) umum yang lebih rumit. Yang diberlakukan mulai dari 1 Januari 2011, setiap entitas diberikan pilihan apakah

menggunakan Standar Akuntansi Keuangan(SAK) Umum atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Apabila entitas tersebut memenuhi kriteria entitas publik, maka tentu tidak ada pilihan lain kecuali menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Umum. Namun jika tidak termasuk entitas yang memiliki akuntan publik, maka entitas dapat memilih menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Menurut kebijakan yang diterbitkan oleh Dirjen Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pada 1 Januari 2011, suatu entitas tanpa akuntabilitas publik, dapat memilih untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Umum.

#### **2.1.6. Pengertian Laporan Keuangan**

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (2012:12) :

“Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi”.

Menurut Irham (2012:02) pengertian laporan keuangan :

“Suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan terlebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Menurut Harahap (2013:105) pengertian laporan keuangan :

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu”.

#### **2.1.7. Laporan Keuangan Koperasi**

Untuk menyajikan laporan keuangan baik dan transparan, maka laporan keuangan membutuhkan beberapa peraturan atau ketentuan yang harus dipenuhi didalamnya. Karena laporan keuangan koperasi digunakan oleh anggota koperasi, pengurus, pengawas, dan pihak – pihak lainnya yang berkepentingan. Dengan demikian, menurut Bernhard (2010 :151) jika ditinjau dari fungsi manajemennya, laporan keuangan sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja dan kemajuan koperasi

#### **2.1.8. Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan Koperasi**

Menurut Kasmir (2013 : 11), tujuan dari pembuatan laporan keuangan yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban serta modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.

4. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
5. Informasi keuangan lainnya.

Sedangkan menurut isi dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (2009:2), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisis keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (2012:12) , karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan koperasi diantaranya adalah :

1. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi.
2. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditujukan untuk pihak internal maupun eksternal koperasi.

3. Laporan keuangan koperasi harus berdayaguna bagi para anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi dan berguna juga untuk mengetahui :
  - a. Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus bertugas memberi pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu:
  - b. Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus ditujukan untuk tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi tertentu:
  - c. Informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan jangka panjang.

Pada badan usaha koperasi, pemiliknya adalah anggota koperasi. Berarti laporan keuangan yang di susun terutama untuk kepentingan anggota. Oleh karena kegiatan koperasi cenderung ditujukan kepada kepentingan anggota maka dalam laporan keuangan sedapat mungkin harus memisahkan antara aktivitas yang dilakukan oleh anggota dan non anggota.

Sesuai isi dari Standar Akuntansi Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (2009:17) Komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), meliputi:

- 1) Neraca.

- 2) Perhitungan Hasil Usaha / Laporan Laba Rugi.
- 3) Laporan perubahan ekuitas.
- 4) Laporan Arus Kas.
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **2.1.9. Perlakuan Khusus Akuntansi Koperasi**

Menurut isi dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (2009:2-5), Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan.

Penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang merupakan informasi kualitatif antara lain :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna.

2. Relevan

Informasi keuangan harus relevan dalam artian harus berhubungan dari mulai pencatatan didalam jurnal hingga akhir penyajian laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan tersebut untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi.

### 3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias (jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk mencapai suatu hasil tertentu).

### 4. Substansi mengungguli bentuk

Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi.

### 5. Pertimbangan sehat

Mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.

### 6. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya.

### 7. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

### 8. Tepat waktu

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi

penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan.

#### 9. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

### **2.1.10. Penyajian Laporan Keuangan**

#### **2.1.10.1. Neraca**

Neraca yang merupakan salah satu unsur laporan keuangan yang menjelaskan posisi keuangan pada saat tertentu, menurut Harahap (2013:21) mendefinisikan neraca sebagai berikut :

“Neraca adalah suatu daftar aktiva, kewajiban dan modal pemilik perusahaan pada tanggal tertentu, yang biasanya pada tanggal terakhir suatu bulan atau tahun.”

Sedangkan neraca badan usaha koperasi menurut Hendrojogi (2012:12) adalah sebagai berikut:

“suatu daftar aktiva yang disusun pada waktu berdirinya koperasi (neraca pembukuan), atau yang disusun pada saat tertentu selama tahun pembukuan masih berjalan (neraca bulanan atau neraca antara) maupun yang disusun pada akhir tahun buku (neraca tahunan, dinyatakan dalam bentuk angka – angka dan bentuk perkiraan *scontro* atau *T account*

ataupun *stuffel* atau *refort form*, dalam hal mana harta atau aktiva, kewajiban atau pasiva dan modal pada saat tertentu atau periode tertentu yang dinyatakan dalam bentuk uang atau nilai uang”.

Informasi yang disajikan dalam neraca menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (2009:19) yang sesuai dalam peraturan menteri negara republik indonesia no.4 tentang perkoperasian dan usaha kecil menengah (UKM)

1. Kas dan setara kas
2. Piutang usaha dan piutang lainnya
3. persediaan
4. Investasi
5. Aset tetap
6. Aset tidak berwujud (akun lainnya)
7. Kewajiban usaha dan kewajiban lainnya
8. Kewajiban diestimasi
9. Ekuitas

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tidak menentukan format atau urutan terhadap pos – pos yang akan disajikan, hanya saja dalam laporan neraca penulisan akun aktiva sudah diperbarui menjadi aset sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) hanya menyediakan daftar pos – pos yang berbeda baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam neraca.

### **2.1.10.2. Penyajian Laporan Laba Rugi**

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (2009:36), perhitungan laporan hasil usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha koperasi dalam satu periode akuntansi, penyajian akhir dari perhitungan hasil usaha disebut Sisa hasil usaha (SHU).

Informasi yang disajikan di dalam laporan laba rugi menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (2009:23 - 24) :

1. Pendapatan
2. Beban pendapatan
3. Beban pajak
4. Laba atau rugi neto (laba atau rugi setelah pajak)

Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Entitas tidak boleh menyajiakan atau mengungkapkan pos pendapatan sebagai pos – pos luar biasa.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ini laporan laba rugi mengharuskan penyajiannya

dalam suatu klasifikasi berdasarkan analisis fungsi beban yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih andal dan relevan.

Berdasarkan metode analisis fungsi beban, beban dikumpulkan sesuai dengan fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau aktivitas administrasi. Sekurang – kuranya entitas harus mengungkapkan biaya penjualannya sesuai metode ini terpisah dari beban lainnya.

Misalnya :

Pendapatan	xxx
Pendapatan operasi lainnya	xxx
Beban pemasaran	(xxx)
Beban umum dan administrasi	(xxx)
Beban operasi lain	<u>(xxx)</u>
Laba bruto	xxx
Beban pajak	<u>(xxx)</u>
Laba neto (sisa hasil usaha)	xxx

Entitas dianjurkan untuk menyajikan analisis diatas pada laporan laba rugi atau laporan sisa hasil usaha.

### **2.1.10.3. Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas**

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 (2012:39), sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) laporan perubahan ekuitas bertujuan

menyajikan laba / rugi koperasi untuk satu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut.

Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas meliputi :

1. Modal di setor
2. Laba / rugi periode.
3. Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui, sesuai kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan untuk setiap komponen ekuitas.

Komponen dalam laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tidak dibagikan pada periode akuntansi.

#### **2.1.10.4. Penyajian Laporan Arus Kas**

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 (2012:39), yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) arus kas adalah arus masuk dan keluar uang tunai atau setara tunai. Laporan arus kas menyediakan informasi tentang perubahan uang tunai dan setara tunai dalam satu entitas untuk periode yang dilaporkan dalam komponen yang terpisah, terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Ada tiga komponen laporan arus kas :

1. Arus kas dari aktivitas operasi, yaitu arus kas yang berasal dari aktivitas utama koperasi.

Meliputi : Laba Rugi tahun berjalan, Penyusutan, Piutang, Beban dibayar dimuka, Kewajiban.

2. Arus kas dari aktivitas investasi, yaitu arus kas penerimaan dan pengeluaran sehubungan dengan sumberdaya yang digunakan untuk tujuan menghasilkan pendapatan masa depan.

Meliputi : pembelian aktiva tetap.

3. Arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu arus kas penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan sumber pendanaan untuk tujuan menghasilkan pendapatan masa depan.

Meliputi : setoran modal, kewajiban terhadap bank ( hutang bank).

4. Saldo kas akhir periode.

Informasi yang disajikan di dalam laporan arus kas menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (2009:23 - 24) yang sesuai dengan peraturan menteri negara republik indonesia no. 4 tahun 2012 tentang koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) :

1. Aktivitas operasi
2. Aktivitas investsi
3. Aktivitas pendanaan

#### **2.1.10.5. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan**

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 (2012:42) sesuai dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Catatan atas laporan keuangan koperasi merupakan bagian yang terpadu dari penyajian laporan keuangan. Catatan digunakan untuk memberi informasi tambahan mengenai pos – pos neraca dan perhitungan hasil usaha.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (2009:34) Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Informasi yang disajikan didalam catatan atas laporan keuangan:

1. Secara umum yaitu : Sejarah perusahaan dan komposisi kepengurusan organisasi.
2. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi perusahaan.
3. Pengungkapan informasi masing – masing akun yang disyaratkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.

4. Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk dipahami.

#### **2.1.11. Permodalan Koperasi**

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sumber modal koperasi terdiri dari beberapa jenis yaitu berupa simpan pinjam baik pokok, wajib, sukarela serta cadangan yang dipupuk dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan kekayaan koperasi.

Disamping itu juga memiliki modal yang bersifat potensial yang didasarkan pada sikap para anggotanya terhadap koperasinya. Modal ini dapat besar dan dapat pula kecil nilainya berkaitan dengan besar atau kecilnya kesadaran orang dalam berkoperasi. Selain sumber di atas yang disebut juga sebagai sumber modal intern. Koperasi dapat pula menambah modalnya berasal dari sumber ekstern yang berasal dari simpanan dan pinjaman atau deposito dari luar keanggotaan koperasi.

Simpanan pokok sebagai dasar atau modal pertama koperasi yang besar simpanannya sama diwajibkan pada calon anggota saat hendak menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil lagi selama masih menjadi anggota koperasi.

Simpanan wajib adalah simpanan yang diwajibkan kepada anggota untuk menyetorkan dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan ini dapat ditarik kembali dengan cara dan waktu yang ditentukan koperasi.

Pada dasarnya simpanan sukarela dapat diterima dari non anggota. Simpanan ini merupakan suatu jumlah tertentu dalam nilai uag yang diserahkan pada koperasi mungkin oleh anggota atau bukan anggota atas hendak sendiri.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Tahun	Judul	Kesimpulan
1.	Sigit Amy Putro (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)	2013	Analisis Penerapan PSAK No. 27 pada Koperasi Karyawan Yodium Farma	Telah dilakukan analisis dan diperoleh hasil bahwa koperasi Karyawan Yodium Farma belum melakukan penerapan secara penuh dalam hal ini dapat dilihat dari penyusunan akun yang tidak dibedakan antara aset tetap dan aset tidak tetap maupun kewajiban dan kewajiban jangka panjang. sebagai standar dalam penyajian laporan keuangan koperasi dan belum menyajikan laporan keuangan secara penuh yaitu tidak adanya catatan atas laporan keuangan.
2.	Ali Mahmudi (Universitas Wijaya Kusuma Surabaya)	2010	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Perkoperasian Pada Kud	Dari hasil analisis, dengan menerapkan sistem akuntansi perkoperasian sesuai dengan prinsip – prinsip yang berlaku maka KUD Tunas Mukti sudah sesuai dengan prinsip –

			Tunas Mukti	<p>prinsip akuntansi perkoperasian karena dari penyajian laporan keuangannya yang lengkap dan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Perkoperasian . Serta dalam kelengkapan laporan keuangan yang di sajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Perkoperasian.</p>
3.	Muhammad Khafid, dkk. (Univeritas Muammadiyah)	2010	Analisis PSAK no. 27 tentang akuntansi perkoperasian dan pengaruhnya terhadap kesehatan usaha pada KPRI	<p>KPRI di Kota Semarang termasuk dalam kategori cukup dalam hal kepatuhan penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan volume usaha secara signifikan. Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan kekayaan bersih. Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sisa hasil usaha secara signifikan.</p>

4.	Anjuman Zuhri (Universitas Pendidikan Ganesa Singaraja Indonesia)	2014	Pengaruh SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada koperasi Lembang Sejahtera.	Penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan KSP Lembang Sejahtera Mandiri berimplikasi pada penurunan sisa hasil usaha KSP Lembang Sejahtera Mandiri. Penurunan ini diakibatkan adanya biaya-biaya yang tidak tercatat pada laporan sisa hasil usaha yang dihasilkan oleh KSP Lembang Sejahtera.
5.	Aini Andhonowarih Widhoretno (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya)	2011	Analisis terhadap penerapan (PSAK) no. 27 tentang Perkoperasian dalam penyajian laporan Keuangan koperasi pada Kopwan Setia Bhakti Wanita	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian tentang analisis terhadap penerapan PSAK no. 27 tentang perkoperasian dalam penyajian laporan keuangan koperasi yaitu : PSAK No. 27 belum sepenuhnya disajikan oleh Kopwan Setia Bhakti Wanita. Hal ini dapat dilihat belum lengkapnya laporan keuangan yang disajikan. Kopwan Setia Bhakti Wanita hanya menyajikan 4 laporan keuangan yaitu neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan promosi ekonomi anggota

				belum disajikan oleh Kopwan Setia Bhakti Wanita. Dan untuk laporan hasil usaha, Kopwan Setia Bhakti Wanita telah memisahkan antara pendapatan anggota dan pendapatan non anggota sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No 27)
--	--	--	--	---

*Sumber : skripsi dan jurnal*

1. Sigit Amy Ariyono Putro (2013) yang berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No 27 Perkoperasian (PSAK NO.27) pada Koperasi Karyawan Yodium Farma “ penelitian ini menggunakan metode deskriptif analaisis kualitatif, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pada Koperasi Karyawan Yodium Farma telah sesuai dengan Standar Akuntasi Tanpa Akuntabilitas Publik. Telah dilakukan analisis dan diperoleh hasil bahwa koperasi Karyawan Yodium Farma belum melakukan penerapan PSAK NO.27 secara penuh sebagai standar dalam penyusunan laporan keuangan koperasi dan belum menyajikan laporan keuangan secara penuh. Pada laporan neraca dengan aktiva lancar dan aktiva tetap serta kewajiban jangka panjang dan jangka pendek masih menjadi satu laporan neraca yang berbeda sesuai dengan PSAK NO.27 bahwa entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sebagai satu

klasifikasi yang terpisah dalam neraca kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang handal dan lebih relevan, jika pengecualian tersebut diterapkan maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

Perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh pada Koperasi Karyawan Yodium Farma dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada Koperasi Karyawan Yodium Farma telah menerapkan dan masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi Tanpa Akuntabilitas Publik, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pada Koperasi Joyo Sukses Sejahtera masih belum diterapkan. Penelitian ini sama sama menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

2. Ali Mahmudi (2010) dengan judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Perkoperasian Pada Kud Tunas Mukti “ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan tersebut telah sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi perkoperasian pada KUD Tunas Mukti. Dan apakah penelitian ini telah sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi perkoperasian dan apakah penerapan tersebut dapat membantu pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan di KUD Tunas Mukti dengan menerapkan prinsip – prinsip yang berlaku sehingga dapat menunjang upaya dalam meningkatkan kinerja koperasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan pengumpulan data

yang dimiliki oleh koperasi seperti laporan keuangan pertanggung jawaban pengurus koperasi yang kemudian diinterpretasikan dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Dari hasil analisis, dengan menerapkan sistem akuntansi perkoperasian sesuai dengan prinsip – prinsip yang berlaku maka KUD Tunas Mukti sudah sesuai dengan prinsip – prinsip akuntansi perkoperasian karena dari penyajian laporan keuangannya yang lengkap dan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan PSAK NO.27. Serta dalam kelengkapan laporan keuangan yang di sajikan telah sesuai dengan PSAK NO.27.

3. Muhammad Khafid, dkk. (2010) Analisis psak no. 27 tentang akuntansi perkoperasian dan pengaruhnya terhadap kesehatan usaha pada kpri KPRI di Kota Semarang termasuk dalam kategori cukup dalam hal kepatuhan penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan volume usaha secara signifikan. Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan kekayaan bersih. Penerapan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan sisa hasil usaha secara signifikan.
4. Anjuman Zuhri (2014), dengan judul “Penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada koperasi Lembang Sejahtera” dari hasil penelitiannya yaitu Penerapan SAK ETAP dalam penyusunan

laporan keuangan KSP Lembang Sejahtera Mandiri berimplikasi pada penurunan sisa hasil usaha KSP Lembang Sejahtera Mandiri. Penurunan ini diakibatkan adanya biaya-biaya yang tidak tercatat pada laporan sisa hasil usaha yang dihasilkan oleh KSP Lembang Sejahtera. Dan KSP Lembang Sejahtera Mandiri belum menyajikan dan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

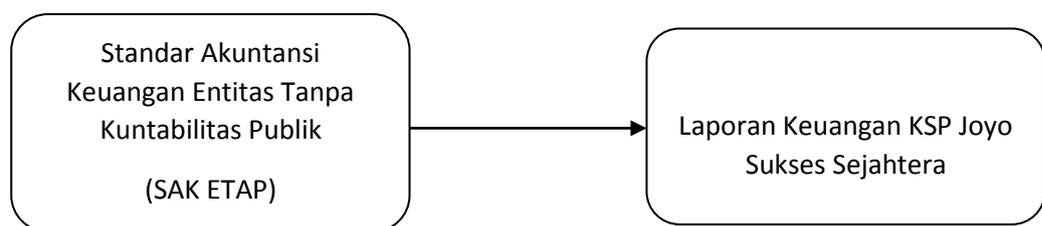
5. Aini Andhonowarih Widhoretno (2011) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya yang berjudul “Analisis terhadap penerapan (PSAK) no. 27 tentang Perkoperasian dalam penyajian laporan Keuangan koperasi pada Kopwan Setia Bhakti Wanita dalam penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian tentang analisis terhadap penerapan PSAK no. 27 tentang perkoperasian dalam penyajian laporan keuangan koperasi yaitu : PSAK No. 27 belum sepenuhnya disajikan oleh Kopwan Setia Bhakti Wanita. Hal ini dapat dilihat belum lengkapnya laporan keuangan yang disajikan. Kopwan Setia Bhakti Wanita hanya menyajikan 4 laporan keuangan yaitu neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk laporan promosi ekonomi anggota belum disajikan oleh Kopwan Setia Bhakti Wanita. Dan untuk laporan hasil usaha, Kopwan Setia Bhakti Wanita telah memisahkan antara pendapatan anggota dan pendapatan non anggota sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK No 27) ini

berarti Kopwan Setia Bhakti Wanita belum mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No 27).

Dari informasi yang tercantum diatas, maka penulis dapat menyimpulkan letak perbedaan penelitian saat ini yang sedang penulis lakukan dengan kedua penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu antara lain:

1. Pemilihan Variabel Penelitian Penulis memilih standar pelaporan akuntansi keuangan untuk unit koperasi terbaru yang berlaku efektif sejak tanggal 01 Januari 2011 dan ditetapkan dalam PERMEN KUKM No. 04/Per/M.KUKM/VII/2012 yang mengacu pada SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik).
2. Pemilihan Objek Penelitian Objek penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Koperasi Simpan Pinjam Joyo Sukses Sejahtera. Koperasi ini lebih dikenal dengan sebutan Koperasi JOSS.

### 2.3. Kerangka Konseptual



*Sumber : olahan penulis*

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan pedoman yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang tidak semua perusahaan mentaati peraturan dan kelengkapan serta metode pencatatan yang ada didalamnya. Pencatatan terhadap penerapan akun – akun yang terdapat didalamnya dan kelengkapan penyajian laporan keuangan yang dapat mempermudah dan dapat menjadikan kinerja keuangan suatu perusahaan dengan lebih baik dan sesuai dengan prinsip – prinsip dan sifat dari laporan keuangan tersebut.

Dari analisa penerapan yang dilakukan yang pada akhirnya akan diketahui pengaruh atas Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang dilakukan perusahaan setelah dilakukannya penerapan tersebut. Untuk lebih jelasnya, alur berpikir diatas dijelaskan melalui gambar diagram kerangka konseptual yang dapat dijabarkan sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini.

Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas, dapat diketahui bahwa Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan salah satu aspek atau pedoman yang sangat berpengaruh dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan khususnya pada badan usaha Koperasi. Sehingga dari Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tersebut dapat diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu

perusahaan. Karena dalam penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Penelitian ini berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 04/ Per/ M.KUKM/ VII/ 2012 yang pada penyajian laporan keuangan yang lengkap yaitu meliputi : Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan . Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan yang kemudian diterapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berlaku. Pada tahap selanjutnya, bisa diambil kesimpulan dari apa yang telah diterapkan tersebut. Dari analisis tersebut dapat diketahui bagaimana perkembangan kinerja keuangan KSP Joyo Sukses Sejahtera.